

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, komputer merupakan teknologi yang terus berkembang dari hari ke hari. Hal ini dikarenakan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang, yang telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk menunjang pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia.

Model komputer tunggal yang digunakan semata-mata untuk melakukan semua tugas komputasi dalam suatu organisasi yang sekarang digantikan oleh satu *node-node* atau komputer, sistem ini disebut jaringan komputer. Dengan kemajuan zaman informasi dan komunikasi, jaringan komputer telah mendorong terbentuknya jaringan, yang telah berkembang menjadi jaringan yang sangat kompleks dan sangat luas, yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan yang kompleks ini disebut jaringan interkoneksi, atau lebih sering disebut *Internet*.

Mikrotik adalah sistem operasi router yang dirilis dengan nama mikrotik routerOs dan dapat diinstal pada komputer biasa tidak seperti sistem operasi router lain yang hanya dapat diinstal pada perangkat keras tertentu. Mikrotik memiliki fitur yang sangat lengkap, seperti : *Firewall, Nat, Routing, Point to Point, DHCP server* dan *DNS server*. Oleh karena itu, Mikrotik RouterOs dapat berbagi koneksi Internet dengan beberapa komputer pengguna [1].

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, salah satunya yaitu pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, pelaksanaan kegiatan tersebut berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi dalam proses komunikasi dan pertukaran data[2]. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan teknis yang dilakukan oleh kementerian

dalam negeri untuk memperlancar arus informasi dalam proses komunikasi dan pertukaran data, diharapkan peran mikrotik routerOs pada jaringan server akan berperan penting untuk terhubung ke internet yang nantinya pengguna akan dengan mudah dalam melakukan pertukaran informasi dari pusat sampai dengan daerah.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari, mengaplikasikan dan membandingkan teori dengan praktik di lapangan kerja khususnya dibidang jaringan.
2. Melakukan rangkaian proses konfigurasi Mikrotik RouterOs pada jaringan *server*.
3. Mendapatkan wawasan baru dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini untuk meningkatkan pola pikir seorang *engineer*.

## 1.3 Tempat Pelaksanaan

### A. Ruang Lingkup

Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Terhitung dari tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022. Penulisan ditempatkan di bagian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yaitu divisi yang bertugas untuk memonitoring dan *maintenance* jaringan telekomunikasi internet dan *computer*.

### B. Aspek Umum Kelembagaan

#### 1. Sejarah Kementerian Dalam Negeri

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut *Departement van Binnenlands Bestuur* yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945), *Departement van Binnenland Bestuur* oleh pemerintah Jepang diubah menjadi *Naimubu* yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan

kebudayaan. *Naimubu* atau Departemen Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.



Gambar 1.1 Logo Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No. 1/MP/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968. Pada Tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri dan sejak berdirinya yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Gotong Royong hingga Kabinet Kerja sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Kementerian Dalam Negeri.

## 2. Visi dan Misi

### A. Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

## B. Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- 2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- 3) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
- 4) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik [3].

## 1.4 Pengumpulan Data

### A. Kajian Pustaka

Dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui *e-book*, manual, dokumen internal, dan internet.

**B. Metode Praktik Langsung**

Dilakukan dengan praktik langsung dengan *troubleshooting* dan analisis dengan bimbingan dari pembimbing lapangan.